

BAB II

DINAMIKA GERAKAN BDS DAN RESPONS INTERNASIONAL

Bab I telah menjelaskan latar belakang masalah dan pentingnya memahami sekuritisasi sebagai pendekatan analisis untuk mengkaji kebijakan Austria terhadap gerakan BDS. Pada bab II berisi gambaran umum yang terbagi menjadi empat sub bab Adapun didalamnya penulis membahas lebih lanjut tentang fenomena gerakan BDS terhadap Israel, respons internasional terhadap gerakan BDS, trauma sejarah dan narasi antisemitisme dalam kebijakan Austria, dan terakhir adalah narasi antisemitisme dan kontestasi definisi kajian mengenai definisi antisemitisme IHRA.

Meski mendapat dukungan dari berbagai kalangan masyarakat sipil global, BDS juga ditentang keras oleh banyak negara, termasuk Austria, yang menyamakannya dengan antisemitisme. Austria secara aktif menolak BDS melalui resolusi parlemen dan kebijakan publik, dengan menggunakan narasi antisemitisme yang berakar dari trauma Holocaust. Negara ini mengadopsi definisi antisemitisme versi IHRA, yang dinilai membatasi ruang kritik terhadap Israel. Kontestasi definisi antisemitisme antara IHRA dan alternatif seperti JDA menunjukkan bahwa isu ini bukan hanya soal etika atau sejarah, tetapi juga medan politik yang menentukan batas kebebasan berekspresi dan solidaritas internasional. Austria, dalam konteks ini, menggunakan narasi sejarah sebagai alat sekuritisasi terhadap BDS.

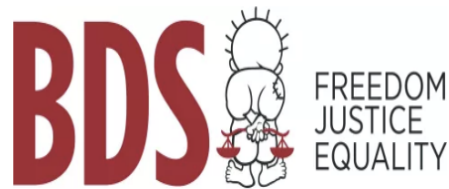
2.1 Fenomena Gerakan BDS Terhadap Israel

Gerakan *Boycott, Divestment, and Sanctions* (BDS) merupakan kampanye internasional yang secara resmi diluncurkan pada tahun 2005 oleh koalisi lebih dari 170 organisasi masyarakat sipil Palestina, termasuk serikat pekerja, asosiasi profesional, jaringan pengungsi, asosiasi perempuan, dan kelompok lainnya. Gerakan ini menyerukan kepada individu maupun institusi global untuk menerapkan boikot luas dan inisiatif divestasi terhadap Israel, meniru strategi yang sebelumnya diterapkan terhadap rezim apartheid Afrika Selatan (BDS Movement, 2005). Tujuan utama BDS adalah untuk menekan Israel agar mematuhi hukum internasional dan prinsip-prinsip hak asasi manusia, termasuk mengakhiri pendudukan atas wilayah Palestina, menjamin kesetaraan hak bagi warga Arab - Palestina di Israel, serta menghormati hak para pengungsi Palestina untuk kembali ke tanah mereka (BDS Movement, 2017).

Meskipun secara resmi dimulai pada 2005, akar dari gerakan ini dapat ditelusuri hingga Konferensi Dunia PBB Menentang Rasisme yang diselenggarakan di Durban, Afrika Selatan, pada tahun 2001. Konferensi ini berlangsung di tengah Intifada Kedua dan menjadi forum penting di mana para aktivis Palestina menyadari adanya dukungan masyarakat sipil internasional terhadap perjuangan mereka. Dalam forum ini pula, narasi yang menyamakan Zionisme dengan rasisme kembali mencuat, yang memperkuat dasar ideologis bagi pembentukan gerakan BDS (Nations, 2001). Namun, konferensi ini juga menuai kontroversi, terutama dari kalangan pro - Israel, yang menganggapnya

penuh retorika anti - Yahudi sehingga delegasi dari Amerika Serikat dan Israel memilih mundur dari acara tersebut.

Gambar 2.1 Logo Gerakan BDS



Sumber : (BDS Movement, 2020)

Istilah BDS sendiri berasal dari tiga strategi utama yang diusung gerakan ini yaitu boikot terhadap produk dan institusi Israel, disinvestasi dari perusahaan yang terlibat dalam pelanggaran HAM di Palestina, serta sanksi internasional terhadap negara Israel yang semuanya dirancang sebagai bentuk tekanan non - kekerasan untuk mendorong perubahan kebijakan. Setiap strategi memiliki pendekatan dan dampak yang berbeda dalam menentang kebijakan dan praktik Israel terhadap Palestina di antaranya adalah:

2.1.1 Boikot (*Boycott*)

Strategi boikot dalam BDS bertujuan untuk menolak keterlibatan ekonomi, budaya, dan akademik dengan entitas yang dianggap mendukung pelanggaran hak asasi manusia oleh Israel terhadap rakyat Palestina. Strategi ini, memfokuskan boikot terhadap produk - produk yang dihasilkan di permukiman ilegal di wilayah pendudukan seperti Tepi Barat dan Yerusalem Timur untuk melemahkan insentif ekonomi yang memungkinkan Israel terus memperluas dan mempertahankan permukiman tersebut. Dengan secara sistematis menolak produk - produk yang berasal dari wilayah ini, gerakan BDS berupaya memutus dukungan finansial dan politik yang menopang struktur kolonial serta melanggar Konvensi Jenewa Keempat.

Strategi ini mengirimkan pesan moral dan hukum bahwa operasi ekonomi di wilayah pendudukan bukan sekadar aktivitas bisnis, melainkan dapat dipahami sebagai bentuk kolaborasi dengan praktik ilegal dan pelanggaran hak asasi manusia. Menurut laporan dari *Human Rights Watch*, perusahaan yang terlibat dalam kegiatan ekonomi di wilayah pendudukan berisiko melanggar hukum humaniter internasional serta memperkuat struktur ketidakadilan yang telah ada (Human Rights Watch, 2016). Gerakan BDS memainkan peran penting dalam mendorong perusahaan - perusahaan internasional maupun lokal untuk menghentikan investasi atau kerja sama bisnis di wilayah pendudukan, guna menghindari keterkaitan reputasional maupun hukum sebagai pihak yang mendukung atau memperoleh keuntungan dari pendudukan ilegal tersebut.

Salah satu contoh produk yang menjadi target boikot adalah kosmetik Ahava, yang memanfaatkan sumber daya dari Laut Mati di wilayah pendudukan. Meskipun perusahaan ini telah mengalami perubahan kepemilikan, keterkaitannya dengan permukiman ilegal tetap menjadi sorotan etis dan hukum (Canadians for Justice and Peace in the Middle East, 2024). Selain produk konsumen, kampanye boikot juga menasar pertunjukan budaya dan kerja sama akademik. Organisasi seperti PACBI (*Palestinian Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel*) menyerukan penghentian kolaborasi dengan institusi akademik Israel, bukan individu, berdasarkan argumen bahwa universitas - universitas Israel turut berperan dalam mendukung kebijakan negara yang diskriminatif terhadap warga Palestina (NGO Monitor, 2011).

Dalam praktiknya, kampanye boikot telah berdampak terhadap reputasi sejumlah perusahaan besar yang kemudian memutuskan mundur dari kontrak atau kegiatan bisnis di Israel dan wilayah pendudukan, seperti Veolia, Orange, dan G4S (Palestinian BDS National Committee (BNC), 2016). Meskipun secara ekonomi dampaknya dinilai masih terbatas, efek politis dan simbolik dari gerakan ini cukup signifikan karena berhasil memicu respons defensif dari Israel dan negara-negara pendukungnya, termasuk dalam bentuk legislasi anti-BDS serta pelabelan negatif terhadap para pendukung gerakan .

Gerakan boikot dalam kerangka BDS dengan demikian tidak hanya menjadi alat tekanan terhadap Israel, tetapi juga sarana mobilisasi internasional yang memperjuangkan keadilan, hak asasi manusia, dan penghormatan terhadap

hukum internasional. Boikot dijalankan sebagai bentuk perlawanan non-kekerasan yang memanfaatkan kekuatan ekonomi dan citra global sebagai instrumen diplomasi dari bawah (Barghouti, 2021)

2.1.2 Divestasi (*Divestment*)

Divestasi merupakan langkah strategis untuk menarik dana investasi dari perusahaan-perusahaan yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia di Palestina. Target divestasi mencakup perusahaan militer dan teknologi seperti Elbit Systems produsen sistem pengawasan yang digunakan di Tembok Pemisah dan perbatasan Gaza dan Hewlett - Packard (HP) yang menyediakan layanan TI untuk sistem biometrik penduduk Palestina. Caterpillar Inc., produsen alat berat, juga menjadi sasaran karena bulldoser mereka digunakan untuk meratakan rumah-rumah warga Palestina di wilayah pendudukan (US Campaign to End the Israeli Occupation, 2009).

Universitas, dana pensiun, dan lembaga keuangan besar menjadi sasaran utama kampanye divestasi BDS karena entitas - entitas ini memiliki investasi signifikan dalam perusahaan-perusahaan yang terkait atau beroperasi di wilayah pendudukan Israel. Mereka sering menyimpan dana dalam jumlah besar melalui *endowment* untuk universitas atau portofolio investasi untuk lembaga keuangan. Dengan menuntut divestasi, gerakan BDS berharap dapat mencabut legitimasi ekonomi dan simbolis dari praktek tersebut, serta memberikan tekanan reputasional dan finansial langsung.

Mahasiswa dan fakultas kerap menjadi penggerak utama gerakan ini karena mereka berada di dalam institusi tersebut dan memiliki akses ke proses pengambilan keputusan investasi apakah melalui dewan pengelola *endowment* atau perwakilan internal. Kampanye ini bertujuan memaksa institusi untuk mengungkapkan peta investasi mereka dan membuat publik sadar keberadaan dana yang mendukung perusahaan yang beroperasi di permukiman ilegal atau terkait dengan militer Israel. Sayangnya, meski muncul tekanan signifikan di kampus - kampus AS, banyak universitas belum mengubah kebijakan mereka karena menghadapi hambatan hukum dan kebijakan internal, seperti perjanjian donor yang mengikat dan regulasi fiduciary yang mencegah pelepasan investasi tanpa analisis risiko finansial yang lengkap sebagaimana diungkap oleh *Financial Times* (Andrew Jack, 2024).

Adapun dari sisi lembaga keuangan besar, investor institusional seperti dana pensiun atau manajer aset mengelola miliaran dolar, sehingga divestasi dari aset Israel dapat memicu perubahan nyata dalam arus modal global. Misalnya, kampanye yang menekan dana pensiun besar di Britania Raya atau lembaga keuangan Norwegia berhasil memicu peninjauan ulang hubungan investasi mereka terhadap perusahaan terkait Israel dan permukiman di Tepi Barat, yang mencerminkan dampak nyata dari tekanan moral dan fiskal (Simon Mundy, 2024).

2.1.3 Sanksi (*Sanctions*)

Sanksi dalam konteks BDS adalah upaya advokasi kepada negara dan organisasi internasional agar menjatuhkan sanksi ekonomi, militer, dan diplomatik terhadap Israel hingga negara tersebut mematuhi hukum internasional dan hak-hak rakyat Palestina. Bentuk sanksi yang diserukan meliputi embargo senjata, pembatasan perdagangan, serta penghentian kerja sama bilateral di berbagai sektor. Kampanye ini mengacu pada preseden sanksi internasional terhadap rezim apartheid di Afrika Selatan yang terbukti efektif dalam mempercepat perubahan kebijakan.

Meskipun tantangan geopolitik membuat realisasi sanksi berskala besar sulit tercapai, BDS tetap konsisten menyerukan tindakan, seperti peninjauan ulang perjanjian perdagangan antara Uni Eropa dan Israel. Pada Mei 2025, Uni Eropa mengumumkan akan meninjau kembali perjanjian asosiasi perdagangan dengan Israel karena situasi kemanusiaan yang memburuk di Gaza. Langkah ini didukung oleh mayoritas negara anggota dan mencerminkan tekanan internasional terhadap kebijakan Israel (Reuters, 2025).

Walaupun BDS tampak sebagai strategi ekonomi, efeknya tidak hanya terbatas pada bidang ekonomi. Ini karena sebagian besar barang yang diekspor Israel adalah produk yang belum jadi, yang berfungsi sebagai bahan baku untuk produk lain, bukan produk akhir yang langsung dibeli oleh konsumen. (Natan Sachs, 2018).

2.1.4 Linimasa BDS 2006 – 2015 dari perspektif Palestina dan Israel

Pada Juni 2006, sekitar 100 individu dan organisasi Israel menyatakan dukungannya terhadap resolusi serikat pekerja Kanada yang menyerukan boikot terhadap Israel. Dukungan ini menandai awal dari keterlibatan warga Israel dalam gerakan BDS. Pada tahun 2007, Komite Nasional BDS Palestina (BNC) dibentuk sebagai badan koordinasi utama gerakan ini, memperkuat struktur organisasi dan memperluas jangkauannya secara global. Di Israel sendiri, dukungan terhadap BDS mulai muncul dari kalangan aktivis dan intelektual (Rachel Giora, 2010). Gerakan BDS juga mulai mendapatkan perhatian di kalangan akademisi dan universitas.

Pada tahun 2009, Hampshire College di Amerika Serikat menjadi institusi pendidikan tinggi pertama yang memutuskan untuk mendivestasi dari perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam pendudukan Israel di Palestina, meskipun keputusan ini kemudian diklaim sebagai bagian dari kebijakan investasi sosial yang bertanggung jawab. Langkah ini memicu diskusi luas tentang peran institusi pendidikan dalam konflik Israel - Palestina (Thrall, 2018).

Secara keseluruhan, periode 2006 hingga 2010 merupakan masa konsolidasi dan ekspansi bagi gerakan BDS, dengan memperluas jaringan dukungan internasional, memperkuat struktur organisasi, dan meningkatkan kesadaran global tentang situasi di Palestina melalui berbagai kampanye dan gerakan solidaritas. Pemerintah Israel pada awalnya menganggap remeh gerakan ini, tetapi pada pertengahan 2010 - an mulai menganggap BDS sebagai ancaman

strategis terhadap citra dan ekonomi negara. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan pejabat lainnya menyebut gerakan ini sebagai anti semit dan bentuk delegitimasi terhadap eksistensi Israel (Beaumont, 2015). Akibatnya, Israel membentuk kementerian khusus untuk menangani BDS dan melobi negara - negara Barat agar mengadopsi kebijakan anti - BDS.

Sejak 2015, gerakan BDS mengalami pertumbuhan signifikan di berbagai belahan dunia, terutama di sektor budaya, akademik, dan masyarakat sipil. Para aktivis berhasil mendorong sejumlah artis internasional, seperti Lorde, untuk membatalkan pertunjukan di Israel sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina (Pitchfork, 2018). Namun, tindakan ini memicu reaksi hukum dari Israel, termasuk gugatan terhadap penulis opini yang mendukung pembatalan konser tersebut berdasarkan undang-undang anti - boikot Israel.

Dari perspektif Palestina, BDS tetap menjadi alat penting dalam perjuangan non-kekerasan untuk hak-hak mereka. Meskipun terdapat tantangan internal dan tekanan eksternal, dukungan terhadap BDS di kalangan masyarakat Palestina tetap kuat (Munayyer, 2018). Berdasarkan sumber Pusat Penelitian Kebijakan dan Survei Palestina, survei tahun 2015 menunjukkan bahwa 86% responden Palestina mendukung kampanye boikot sebagai sarana untuk mengakhiri pendudukan (Palestinian Center For Policy And Survey Research, 2015). Namun, keterbatasan akses terhadap alternatif produk non - Israel di wilayah pendudukan menjadi hambatan dalam implementasi boikot secara luas.

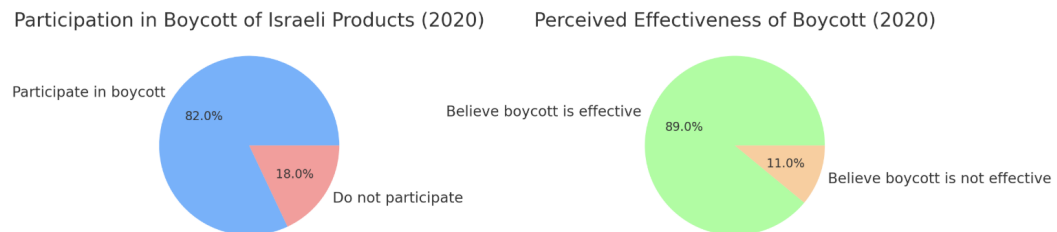
Sedangkan pemerintah Israel menganggap BDS sebagai ancaman strategis terhadap legitimasi negara. Sebagai respons, pada Maret 2017, Knesset

mengesahkan Amandemen No. 28 terhadap Undang - Undang Masuk ke Israel, yang melarang masuknya individu asing yang secara publik mendukung boikot terhadap Israel atau wilayah yang dikontrolnya. Langkah ini mencerminkan upaya Israel untuk menekan gerakan BDS melalui kebijakan hukum dan diplomatik (Hatuqa, 2017).

2.1.5 Tren Pada Tahun 2020

Survei yang dilakukan oleh Konrad - Adenauer - Stiftung pada tahun 2020 menemukan bahwa 82% responden Palestina menyatakan mereka berpartisipasi dalam memboikot barang-barang Israel yang memiliki alternatif lokal. Mayoritas responden juga percaya bahwa gerakan boikot ini efektif, dengan hanya 11% yang menganggapnya tidak efektif (Konrad - Adenauer - Stiftung, 2020). Pada tahun 2020, gerakan BDS mengalami lonjakan dukungan yang signifikan di berbagai belahan dunia sebagai respons terhadap intensifikasi konflik Israel - Palestina (Carrie Keller-Lynn, 2024). Gerakan ini, yang bertujuan menekan Israel agar menghentikan pendudukan dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga Palestina, semakin mengakar terutama di kalangan akademisi, pemerintah lokal, dan sektor budaya (Ali, 2023). Di sektor pendidikan tinggi, beberapa universitas ternama seperti Universitas Manchester di Inggris menarik investasi dari perusahaan yang terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia oleh Israel (Middle East Monitor, 2020). Di Amerika Serikat, mahasiswa di Universitas Columbia, Universitas Illinois Urbana - Champaign, dan San Francisco State University mendukung gerakan divestasi (Boycott Divestment and Sanctions Campaign, 2020). Kampanye boikot terhadap Puma juga memperoleh kemenangan ketika Universiti Teknologi MARA (UiTM) di Malaysia (The Palestinian Information Center, 2020).

Grafik 2.1 Survei Tingkat Kepercayaan Terhadap Gerakan BDS



Sumber : Konrad - Adenauer - Stiftung, 2020

Gerakan BDS juga mencapai pencapaian di dalam hukum. Di Eropa, Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa memutuskan bahwa Prancis melanggar kebebasan berekspresi dengan menghukum aktivis BDS (Barrows-Friedman, 2020). Sementara itu di Amerika Serikat, pengadilan negara bagian Washington membatalkan gugatan terhadap anggota dewan Olympia Food Co-op yang memboikot produk Israel (Campaign to Boycott Supporters of Israel in Lebanon, 2020). Dalam ranah budaya, sebagai tanggapan terhadap normalisasi hubungan antara Israel dan beberapa negara Arab, hampir 100 seniman Arab serta 17 organisasi budaya menyatakan akan memboikot acara yang disponsori oleh Uni Emirat Arab (Aslan, 2020). Selain itu, perusahaan keamanan G4S kehilangan kontrak penting dari UNDP dan sebuah perusahaan multinasional di Yordania, yang menunjukkan efektivitas tekanan BDS (Ryvka Barnard, 2015).

Namun demikian, gerakan BDS menghadapi tantangan serius. Pemerintahan Trump di AS secara resmi menyatakan BDS sebagai gerakan antisemit dan berjanji untuk menghentikan pendanaan federal terhadap organisasi

yang mendukungnya (Mansoor, 2020). Di Eropa, sejumlah parlemen seperti Austria dan wilayah Balearic di Spanyol mengadopsi resolusi yang mengutuk BDS (BDS in Spain, 2020). Sebuah laporan bahkan menunjukkan adanya penurunan sekitar 40% dalam pencarian daring terkait BDS di AS, yang mengindikasikan penurunan aktivitas online gerakan ini (Yakir Benzion, 2021). Meskipun menghadapi berbagai upaya delegitimasi, gerakan BDS tetap memperoleh dari lebih dari 40 organisasi Yahudi progresif dan sejumlah lembaga keuangan. Dukungan dari lebih dari 40 kelompok Yahudi progresif seperti *Jewish Voice for Peace*, *Jews for Justice for Palestinians*, dsb memberikan legitimasi moral dan simbolik terhadap BDS (Jewish Voice For Peace, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa gerakan tersebut tidak bersifat anti semitisme karena nyatanya juga didukung oleh sebagian kalangan Yahudi yang mendukung perjuangan hak asasi manusia.

Tabel. 1.1 Linimasa Perkembangan Gerakan BDS (2006–2020)

Tahun	Peristiwa/Perkembangan Utama	Aktor Terkait	Dampak
2006	100 individu dan organisasi Israel dukung resolusi boikot serikat pekerja Kanada	Aktivis Israel	Awal keterlibatan warga Israel dalam BDS

2007	Pembentukan BNC (Palestinian BDS National Committee)	Komite Nasional BDS Palestina	Konsolidasi organisasi dan ekspansi global
2009	Hampshire College mendivestasi dari perusahaan yang terlibat dalam pendudukan	Institusi pendidikan tinggi AS	Meningkatkan kesadaran akan peran akademisi dalam konflik
2006–2010	Ekspansi dan kampanye internasional	Aktivis, universitas, organisasi solidaritas	Penguatan jaringan dan peningkatan kesadaran global
2010–2015	Israel mulai menyikapi BDS sebagai ancaman strategis; tuduhan antisemitisme dan delegitimasi	Pemerintah Israel, Netanyahu	Pembentukan kementerian khusus anti - BDS, lobi ke negara-negara Barat
2015	Artis internasional (misalnya Lorde) batalkan konser di Israel	Aktivis budaya, artis	Efektivitas tekanan budaya; reaksi hukum Israel

2015	Survei: 86% warga Palestina mendukung BDS	Palestinian Center for Policy and Survey Research	Dukungan lokal yang kuat, kendati implementasi boikot terbatas oleh akses
2017	Amandemen UU Masuk ke Israel: larangan masuk bagi pendukung BDS	Knesset (Parlemen Israel)	Upaya hukum menekan gerakan BDS
2018	Dukungan dari lebih dari 40 kelompok Yahudi progresif seperti <i>Jewish Voice for Peace</i> , <i>Jews for Justice for Palestinians</i> ,	Kelompok Yahudi Progresif	Menunjukkan bahwa gerakan tersebut tidak bersifat anti semitisme karena nyatanya juga didukung oleh sebagian kalangan Yahudi yang mendukung perjuangan hak asasi manusia.
2020	Survei Konrad Adenauer: 82% warga Palestina memboikot produk Israel bila ada alternatif	Konrad-Adenauer-Stiftung	Tingkat partisipasi lokal tinggi

2020	Divestasi di kampus (Manchester, Columbia, UIUC, SFSU); kampanye Puma di Malaysia (UiTM)	Mahasiswa, universitas, aktivis	Peningkatan dukungan di sektor pendidikan dan budaya
2020	Kemenangan hukum di Eropa (Pengadilan HAM Eropa) dan AS (negara bagian Washington)	Pengadilan HAM Eropa, Olympia Food Co-op	Pengakuan legal terhadap hak boikot sebagai kebebasan berekspresi
2020	Boikot seniman Arab terhadap acara yang disponsori UEA	100 seniman Arab, 17 organisasi budaya	Penolakan normalisasi dengan Israel
2020	G4S kehilangan kontrak penting karena tekanan BDS	UNDP, perusahaan multinasional di Yordania	Dampak ekonomi terhadap perusahaan terlibat dalam pelanggaran HAM
2020	Trump menyatakan BDS sebagai gerakan antisemit; ancaman	Pemerintah AS	Upaya delegitimasi dan kriminalisasi BDS

	pemotongan dana untuk organisasi pendukung		
2020	Parlemen Austria dan wilayah Balearic (Spanyol) mengecam BDS	Pemerintah lokal/parlemen	Resolusi hukum menentang gerakan BDS
2020	Penurunan 40% pencarian daring tentang BDS di AS	Media (laporan Yakir Benzion)	Indikasi menurunnya aktivitas online

2.2 Respons Internasional Terhadap Gerakan BDS

Gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS) telah memicu respons yang sangat beragam di tingkat internasional, mencerminkan perbedaan kebijakan luar negeri, tekanan politik domestik, serta sikap terhadap konflik Israel - Palestina. Meskipun gerakan ini mendapatkan dukungan luas secara global, terdapat pihak - pihak, baik negara maupun non - negara, yang menentang gerakan tersebut. Pihak kontra berpendapat bahwa gerakan ini merupakan manifestasi lanjutan dari anti - semitisme, yang berpotensi memperluas sentimen kebencian terhadap komunitas Yahudi. Penelitian dari Ellen Cannon pada tahun 2019 menunjukkan bahwa BDS sukses menjadi alat perlawanan terbaik yang mampu menjelek - jelekkan,

mendelegitimasi dan mencela Israel, Zionisme, Yahudi dan Amerika Serikat (Cannon, 2019).

2.2.1 Tanggapan Israel Sebagai Target Utama BDS

Sebagai negara yang menjadi target utama gerakan BDS, Israel menganggap gerakan ini sebagai "*Strategic Threat*" dan telah membentuk unit-unit khusus untuk menangani dampaknya. Pada Juli 2011, parlemen Israel mengesahkan undang-undang yang menjadikan dukungan terhadap gerakan boikot sebagai pelanggaran perdata; dengan kata lain, setiap warga Israel yang mendukung gerakan boikot dapat dituntut dan diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak yang menjadi sasaran boikot (Human Rights Watch, 2015). Undang-undang ini kemudian direvisi pada 2015 dan disusul dengan pengesahan undang-undang pada 2017 yang melarang warga asing yang mendukung boikot terhadap Israel atau pemukimannya untuk memasuki negara tersebut (Liebermann, 2017). Akibat dari kebijakan ini, dua anggota Kongres AS, Rashida Tlaib dan Ilhan Omar, ditolak masuk ke Israel pada 2019 karena dukungan mereka terhadap gerakan BDS, sebuah langkah yang memicu kontroversi internasional (BBC News, 2019).

Selain langkah hukum, Israel juga melakukan berbagai upaya untuk melawan BDS melalui aktivitas masyarakat sipil. Untuk mendukung tujuan ini, Kementerian Urusan Strategis dan Diplomasi Publik mulai beroperasi pada 2015 dengan fokus pada kampanye kontra terhadap gerakan BDS (Weinthal, 2017).

Pada 2017, kabinet Israel mengalokasikan dana sebesar 128 juta shekel selama tiga tahun untuk mendanai inisiatif - inisiatif tersebut (Landau, 2020). Salah satu langkah konkret kementerian ini adalah mendanai media-media Israel untuk menerbitkan laporan yang mendukung posisi Israel terhadap BDS serta menyelenggarakan konferensi internasional bertema anti - BDS (Itamar Benzaquen, 2020). Kementerian ini juga secara finansial mendukung beberapa organisasi non-pemerintah (NGO) untuk bekerja dalam melawan BDS.

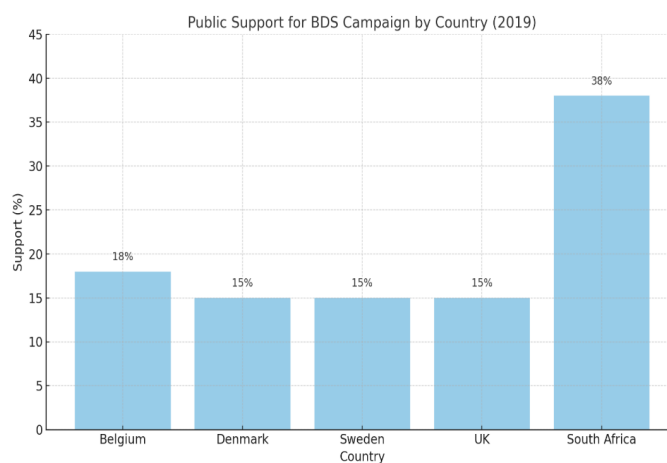
Sebagai contoh, Maala, sebuah organisasi nirlaba yang mempromosikan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di Israel, mulai menerima dana dari kementerian pada 2016. (Işik, 2020) Organisasi ini berperan dalam menyelenggarakan acara internasional yang disebut-sebut sebagai "perwakilan resmi dari beberapa jaringan CSR global". Menurut laporan Haaretz, sebuah surat kabar liberal di Israel, Kementerian Luar Negeri Israel mengalami kekurangan anggaran sebesar 100 juta dollar AS dalam beberapa tahun terakhir karena dana tersebut dialihkan untuk mendanai upaya melawan BDS (Landau, 2019).

2.2.2 Respon Eropa Terhadap Gerakan BDS

Dukungan terhadap gerakan BDS di Eropa umumnya tergolong rendah dan sering kali menjadi isu kontroversial di ranah politik dan masyarakat sipil. Survei yang dilakukan oleh Anti - Defamation League (ADL) pada tahun 2019 menunjukkan bahwa tingkat dukungan tertinggi terhadap BDS berada di Belgia (18%), diikuti oleh Denmark, Swedia, dan Inggris dengan tingkat dukungan masing-masing sekitar 15%. Survei ini menggarisbawahi bahwa meskipun

terdapat simpati terhadap hak - hak Palestina di sebagian kalangan, gerakan BDS tetap mengalami resistensi luas di kalangan masyarakat Eropa, terutama terkait narasi bahwa strategi BDS dapat menyulut sentimen antisemitisme (Anti-Defamation League, 2019b).

Grafik 2.2 Dukungan Terhadap Gerakan BDS



Sumber : Anti - Defamation League (ADL), 2019

Di Eropa Tengah dan Timur (*Central and Eastern European Countries/CEECs*), seperti Polandia, Hungaria, dan Republik Ceko menunjukkan respons yang cenderung pasif terhadap gerakan BDS terhadap Israel. Seruan untuk memboikot Israel jarang muncul di wilayah ini dan jika pun ada, berasal dari kelompok - kelompok kecil dengan pengaruh yang terbatas. Tidak seperti di Amerika Serikat dan Inggris, di mana gerakan BDS mendapat dukungan yang cukup besar terutama di kalangan kampus, gerakan serupa di negara-negara

seperti Polandia, Republik Ceko, dan Hungaria tidak memperoleh perhatian publik yang signifikan (Kalhousová, 2024).

Minimnya tekanan sosial memungkinkan hubungan bilateral antara negara - negara ini dengan Israel terus berkembang, termasuk di sektor budaya dan pendidikan. Seniman Israel dapat tampil tanpa menghadapi gerakan protes, sementara seniman dari negara-negara Eropa Tengah juga tidak mendapatkan tekanan untuk membatalkan kunjungan mereka ke Israel. Sebagai contoh, pada tahun 2022 acara publik untuk merayakan Hari Kemerdekaan Israel berlangsung di pusat kota Budapest dan Praha tanpa menimbulkan penolakan berarti dari masyarakat (Prague Morning, 2022).

Kerja sama juga terlihat dalam bidang akademik, di mana institusi pendidikan di Eropa Tengah menjalin hubungan dengan universitas - universitas di Israel tanpa kontroversi. Bahkan, beberapa universitas di Polandia menjalin kerja sama dengan Ariel University, yang terletak di wilayah pendudukan, langkah yang di negara lain mungkin akan memicu reaksi keras (Dyduch, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa di kawasan ini, kolaborasi akademik dengan Israel dipandang secara pragmatis sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu pendidikan.

Secara politik, elite pemerintahan di Eropa Tengah juga secara aktif menolak inisiatif yang berkaitan dengan gerakan boikot terhadap Israel. Salah satu contohnya adalah Misalnya, pada tahun 2019, Parlemen Ceko mengadopsi sebuah resolusi yang tidak hanya mengecam gerakan BDS tetapi juga menyerukan agar

pemerintah tidak memberikan dukungan apapun kepada organisasi yang terlibat dalam upaya boikot terhadap Israel (Ahren, 2019). Selain itu, negara-negara ini juga mengkritik kebijakan Uni Eropa tahun 2015 mengenai pelabelan produk dari pemukiman Israel, yang mereka anggap sebagai bentuk dukungan terselubung terhadap gerakan boikot (Greene & and Rynhold, 2018)

Faktor sosial dan demografis turut memengaruhi respons ini. Tidak adanya komunitas Muslim yang besar di wilayah tersebut membuat isu Palestina tidak mendapatkan banyak perhatian di tingkat akar rumput. Akibatnya, demonstrasi pro - Palestina yang biasanya terjadi selama konflik bersenjata di Timur Tengah pun hanya menarik sedikit peserta dan tidak berdampak signifikan terhadap kebijakan pemerintah (Kalhousová, 2024). Jerman menjadi kasus penting dalam konteks Eropa karena *Bundestag* (Parlemen Jerman) pada Mei 2019 mengadopsi resolusi yang menyatakan bahwa argumen dan metode BDS bersifat antisemit. Resolusi ini, meskipun tidak mengikat secara hukum, berdampak luas karena menyerukan pelarangan pendanaan negara terhadap organisasi yang mendukung gerakan BDS (Deutscher Bundestag, 2019).

Di Prancis, respons terhadap gerakan BDS bersifat represif secara hukum. Pemerintah Prancis telah beberapa kali menuntut aktivis BDS dengan tuduhan provokasi kebencian berdasarkan hukum anti - rasisme negara tersebut. Namun, pada 2020, Mahkamah Eropa untuk Hak Asasi Manusia (ECHR) memutuskan bahwa penuntutan terhadap aktivis BDS di Prancis melanggar hak atas kebebasan berekspresi sebagaimana dilindungi dalam Pasal 10 Konvensi Eropa tentang Hak

Asasi Manusia (European Court Of Human Rights, 2020). Putusan ini menandai ketegangan antara pendekatan hukum nasional dan standar hak asasi manusia Eropa. Meski begitu, beberapa otoritas lokal tetap mengadopsi langkah-langkah yang membatasi aktivitas BDS. Sebagai contoh, Dewan Kota Paris telah mengadopsi dua resolusi yang tidak mengikat yang mengutuk upaya untuk memboikot Israel. Resolusi - resolusi tersebut diajukan oleh koalisi pimpinan Sosialis dari Walikota Anne Hidalgo dan oleh anggota pusat-kanan Dewan Kota. Salah satu resolusi menyatakan bahwa Kota Paris " secara terbuka menentang semua upaya untuk mengisolasi Israel dari kolektif bangsa - bangsa dan juga menegaskan kembali " Komitmen kota untuk mempromosikan solusi damai untuk konflik Palestina - Israel." Resolusi - resolusi tersebut secara khusus menyebutkan gerakan BDS yang ilegal di Prancis (JTA, 2016).

Respons negara-negara Eropa Barat lainnya bervariasi. Di Inggris, meskipun pemerintah menyatakan sikap menentang gerakan BDS, terdapat ruang lebih luas bagi masyarakat sipil untuk menyuarakan dukungan terhadap Palestina. Namun, pada 2023 pemerintah Inggris mengajukan RUU *Economic Activity of Public Bodies (Overseas Matters) Bill*, yang bertujuan membatasi lembaga-lembaga publik (termasuk universitas dan otoritas lokal) dari terlibat dalam gerakan boikot terhadap negara asing tertentu, termasuk Israel (GOV.UK, 2023). RUU ini menuai penolakan dari organisasi HAM, termasuk Amnesty International yang menilai kebijakan tersebut sebagai upaya untuk membatasi kebebasan berekspresi dan solidaritas internasional (Amnesty International UK, 2023).

Sementara itu, di Spanyol dan Irlandia, gerakan BDS relatif mendapatkan lebih banyak ruang dalam masyarakat sipil. Di Irlandia, Kongres Serikat Buruh Irlandia merupakan federasi serikat buruh Eropa pertama yang mendukung Boikot, Divestasi, dan Sanksi terhadap Israel (2007) menyusul Kongres Serikat Buruh Afrika Selatan (2006) (Louvet, 2016). Spanyol menunjukkan pola serupa, di mana sejumlah dewan kota sempat menyatakan diri sebagai "zona bebas apartheid Israel", walaupun kemudian beberapa keputusan ini dibatalkan oleh pengadilan nasional atas dasar (Mendel, 2018). Dukungan masyarakat sipil di kedua negara ini mencerminkan pengaruh kuat dari gerakan akar rumput dan solidaritas internasional terhadap perjuangan Palestina.

Dengan demikian, respons Eropa terhadap gerakan BDS tidak bersifat homogen. Terdapat perbedaan signifikan dalam pendekatan negara-negara Eropa berdasarkan dinamika domestik, sejarah hubungan dengan Israel, serta kerangka hukum dan budaya politik masing-masing. Di satu sisi, kekhawatiran terhadap anti semitisme dan kepentingan geopolitik mendorong banyak negara untuk mengambil sikap keras terhadap gerakan tersebut. Di sisi lain, prinsip-prinsip demokrasi liberal, termasuk kebebasan berekspresi dan solidaritas transnasional, menjadi dasar bagi sebagian kalangan untuk menolak pembatasan terhadap gerakan ini.

2.3. Reaksi Austria Terhadap Gerakan BDS

Austria secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap Israel dalam menghadapi gerakan Boycott, Divestment, and Sanctions (BDS), yang dianggap

sebagai bentuk kampanye anti - Semitisme (Wheintal, 2017). Padahal, Austria sendiri dikenal sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, sebagaimana tercantum dalam konstitusinya. Semua orang yang tinggal di Austria menikmati hak - hak yang dijamin oleh konstitusi tersebut (Austrian Embassy Washington, 2020). Bahkan, Austria menempati peringkat ke - 15 dari 162 negara dalam Indeks Kebebasan Manusia 2020 yang menilai kebebasan pribadi, sipil, dan ekonomi (Expatica, 2025).

Pada Januari 2020, Parlemen Austria mengeluarkan resolusi yang menolak gerakan BDS dan seluruh bentuk anti - Semitisme terkait Israel. Resolusi ini muncul sebagai respons terhadap kampanye BDS di Austria yang menyerukan boikot terhadap produk, artis, dan atlet Israel. Parlemen menyepakati bahwa gerakan BDS harus dikutuk keras dan tidak boleh menerima dukungan finansial maupun bentuk dukungan lainnya (Parlament Österreich, 2020a). Resolusi tersebut menegaskan bahwa anti - Semitisme harus dilawan secara tegas, termasuk melalui penolakan terhadap BDS (Austrian Embassy Washington, 2020). Hal ini menunjukkan kontradiksi antara prinsip hak asasi manusia yang dijunjung Austria dan sikapnya yang cenderung membela Israel secara sepihak, alih - alih memperhatikan hak - hak rakyat Palestina yang terdiskriminasi.

Resolusi ini juga mendesak Pemerintah Federal Austria untuk mengambil langkah konkret dalam memerangi anti-Semitisme dan menolak BDS. Pemerintah diminta untuk tidak menyediakan ruang atau infrastruktur bagi organisasi yang menyuarakan pandangan antisemitisme atau yang mempertanyakan hak eksistensi

Israel. Selain itu, pemerintah diminta menyusun strategi komprehensif untuk memberantas segala bentuk antisemitisme, rasisme, xenofobia, radikalisasi, dan ekstremisme kekerasan, dengan melibatkan seluruh badan terkait (Parlament Österreich, 2020a). Resolusi ini didukung oleh lima partai besar di Dewan Nasional Austria, dan karena para anggota parlemen umumnya mengikuti garis partainya, resolusi tersebut disahkan secara bulat (Staff & Ahren, 2020).

Secara resmi, resolusi tersebut diadopsi pada 27 Februari 2020 dan mencakup lima poin utama. Pertama, pengembangan strategi nasional untuk melawan semua bentuk antisemitisme sebagai bagian dari upaya yang lebih luas melawan rasisme dan ekstremisme. Kedua, kutukan terhadap gerakan BDS dan seruannya untuk memboikot entitas Israel. Ketiga, pelarangan penyediaan tempat bagi kelompok yang mengusung pandangan anti-Semit. Keempat, larangan pemberian dukungan finansial maupun non-finansial terhadap kegiatan pro-BDS. Kelima, penguatan peran Austria sebagai pusat dialog dan pertukaran internasional (Parlament Österreich, 2020).

Austria memandang BDS sebagai bentuk diskriminasi terhadap Yahudi dan Israel, yang mengingatkan pada sejarah panjang anti-Semitisme sejak Abad Pertengahan. Oleh karena itu, segala bentuk diskriminasi terhadap Yahudi dianggap tidak dapat ditoleransi, demi mencegah terulangnya masa kelam tersebut. Austria juga mengimbau negara-negara anggota Uni Eropa untuk mengikuti langkah serupa. Seruan ini disambut positif oleh *Transatlantic Friends*

of Israel (TFI) di Parlemen Eropa, yang memuji langkah Austria dan mendorong negara-negara lain di Eropa untuk bertindak serupa (Wheintal, 2020).

Masuknya kampanye BDS ke Eropa, termasuk Austria, berlangsung melalui jalur solidaritas lintas negara, aktivitas jaringan HAM internasional, dan adaptasi wacana hak asasi manusia global. BDS secara strategis memanfaatkan dukungan lembaga-lembaga seperti Amnesty International dan Human Rights Watch yang mengkritik kebijakan pendudukan Israel, serta dukungan dari serikat pekerja, asosiasi akademik, dan gereja progresif di Eropa (BDS Movement, 2020). Austria menjadi salah satu penerima pengaruh jaringan ini melalui kampanye daring lintas negara, kolaborasi aktivis HAM Eropa, pertukaran pengetahuan akademik, dan kegiatan solidaritas lintas batas. Misalnya, acara diskusi publik, pemutaran film, dan kuliah umum tentang Palestina yang menghadirkan narasumber dari Jerman atau Inggris menjadi medium penting dalam transfer gagasan BDS ke ruang - publik Austria. Aktivis lokal juga berjejaring melalui platform seperti *European Coordination of Committees and Associations for Palestine* (ECCP), yang menyediakan materi kampanye multibahasa serta strategi advokasi ke parlemen lokal (ECCP, 2021). Di beberapa universitas Austria, diskursus seputar boikot akademik terhadap institusi Israel sempat muncul dalam forum mahasiswa, meskipun menuai kritik keras dari pemerintah dan komunitas Yahudi Austria (Die Presse, 2019). Karakter transnasional ini menjadikan BDS bukan sekadar ekspresi lokal, tetapi bagian dari dinamika global yang membawa wacana hak asasi manusia ke dalam ranah politik domestik Austria.

Sejak 2014, banyak kelompok pro - Palestina di Austria yang berhenti beroperasi akibat tekanan politik dan represi institusional. Salah satu contohnya adalah Gerakan Pemuda Palestina yang tidak lagi aktif, sehingga menjadikan BDS sebagai satu - satunya kelompok pro - Palestina resmi yang masih bertahan secara konsisten di Austria hingga saat ini. Selain BDS, terdapat pula *Palästina Solidarität Österreich* (Solidaritas Palestina Austria), yang pada dasarnya berfungsi sebagai koalisi payung untuk berbagai elemen pro - Palestina, namun dengan profil yang lebih longgar dan tidak sejelas atau seintensif BDS dalam kampanye publik (Salma, 2025). Dalam konteks ini, BDS bukan sekadar salah satu dari banyak gerakan pro - Palestina, melainkan memiliki posisi yang lebih menonjol dan implikasi politik yang berbeda, terutama karena pendekatan advokatifnya yang frontal dan sistematis terhadap institusi-institusi yang dianggap berkontribusi pada praktik apartheid Israel.

Secara institusional, BDS Austria secara resmi dibentuk pada Mei 2014 dan beroperasi dalam skala kecil namun konsisten, dengan aktivitas kampanye publik seperti *Israeli Apartheid Week*, pemutaran film, diskusi, serta aksi boikot terhadap produk dan institusi yang diasosiasikan dengan negara Israel. Salah satu contoh awal adalah boikot terhadap restoran “ *Tel Aviv Beach* ” dan festival film Israel di Wina pada 2014, yang dianggap sebagai bentuk normalisasi terhadap pendudukan Israel (BDS Austria, 2014). Meski gerakan ini kecil secara jumlah, kehadirannya memicu respons keras dari otoritas lokal. Pada 2018, Pemerintah Kota Wina melarang kelompok BDS menggunakan ruang publik, dan larangan ini diperkuat dengan resolusi Parlemen Austria pada Februari 2020 yang secara resmi

mengecam BDS sebagai gerakan antisemitik dan menyerukan agar negara tidak mendukungnya dalam bentuk apa pun (Austrian Parliament, 2020). Bahkan, seorang aktivis BDS Austria menjadi target gugatan hukum oleh Pemerintah Kota Wina setelah membagikan materi kampanye bertuliskan “ *Visit Apartheid* ” dalam bentuk poster digital yang diklaim mencemarkan nama baik kota tersebut. Aktivis tersebut menghadapi tuntutan ganti rugi hingga €17.000, dalam apa yang disebut organisasi internasional sebagai contoh praktik SLAPP (*Strategic Lawsuit Against Public Participation*), yakni strategi hukum untuk membungkam kritik publik (Protect the Protest, 2023). Perkara ini kemudian menarik perhatian jaringan advokasi internasional seperti Protect the Protest dan beberapa pelapor khusus PBB, yang menilai bahwa tindakan pemerintah Austria berpotensi melanggar prinsip - prinsip kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai.

Dengan demikian, BDS di Austria bukanlah gerakan yang lahir secara organik dari dinamika domestik, melainkan hasil dari arus global aktivisme transnasional yang membawa isu Palestina - Israel ke dalam ruang publik Eropa. Meskipun skalanya relatif kecil, keberadaan BDS Austria berhasil memicu respons politik dan hukum yang signifikan, menandakan bahwa pemerintah memandang gerakan ini sebagai ancaman terhadap narasi dominan tentang Israel, antisemitisme, dan hubungan luar negeri Austria.

Respons Austria terhadap gerakan BDS telah berkembang secara bertahap dan melibatkan berbagai aktor negara maupun non - negara. Pada tahun 2016, lebih dari 7.000 orang Yahudi di Wina menyatakan penolakan terhadap gerakan

BDS karena dianggap mengandung unsur antisemitisme (FDD, 2016). Setahun kemudian, pada 2017, Dewan Masyarakat Austria - Israel (*Österreichisch-Israelische Gesellschaft*) juga menyampaikan penolakan terhadap BDS. Mereka menilai bahwa BDS memiliki agenda antisemitisme dan terlibat dalam kampanye demonisasi serta delegitimasi terhadap Israel. Stefan Schaden, salah satu anggotanya, menyoroti bahwa BDS Austria bahkan tidak terdaftar secara resmi di Kementerian Dalam Negeri, menunjukkan lemahnya legitimasi gerakan tersebut secara hukum (*Österreich Israelische Gesellschaft*, 2020). Pada tahun yang sama, Perhimpunan Mahasiswa Nasional Austria (*Österreichische Hochschülerinnen - und Hochschülerschaft / ÖH*) secara resmi meloloskan resolusi yang menyatakan bahwa kampanye BDS bersifat antisemitisme, menyerukan pelarangan dukungan finansial dan fasilitas kampus bagi kelompok pendukung BDS, serta mengadopsi definisi antisemitisme dari IHRA (*The Jerusalem Post*, 2017).

Memasuki tahun 2018, pemerintah daerah juga mulai mengambil langkah. Pada 27 Juni 2018, Dewan Kota Wina secara bulat meloloskan resolusi yang menyatakan BDS sebagai gerakan antisemitik dan melarang penyelenggaraan acara yang terkait dengannya. Salah satu anggota Dewan Kota, Peter Florianschütz, menegaskan bahwa BDS merupakan bagian dari antisemitisme global dan menyerukan pelarangan penggunaan fasilitas publik untuk aktivitas BDS (*Stadt Wien*, 2018). Pada bulan April di tahun yang sama, Erste Group perusahaan jasa keuangan Austria menutup rekening milik BDS Austria, yang diduga sebagai respons atas tekanan politik. Meski pihak bank tidak

menyampaikan alasan spesifik, langkah ini mencerminkan tren yang sama di negara - negara Eropa lainnya dalam merespons kekhawatiran akan potensi ekstremisme (Weinthal, 2017). Pada 14 November 2019, Dewan Kota Graz menyusul dengan mengadopsi resolusi yang menentang antisemitisme dan melarang dukungan terhadap BDS, termasuk pelarangan penggunaan fasilitas kota untuk kegiatan yang berafiliasi dengan gerakan tersebut (Stadt Graz, 2019). Pada tahun yang sama, politisi dari berbagai partai di parlemen Austria mulai menggalang dukungan untuk mengeluarkan resolusi nasional melawan BDS. Tokoh dari Partai Hijau, Sibylle Hamann, bahkan membandingkan slogan BDS dengan propaganda Nazi "*Don't buy from Jews*", menunjukkan kekhawatiran mendalam terhadap gema sejarah antisemitisme (The Jerusalem Post, 2019).

Partai KPÖ di Graz, yang pada awalnya menolak mendukung resolusi anti - BDS pada 2019, kemudian pada 2021 mengambil posisi tegas menolak BDS dengan alasan bahwa seruan boikot tersebut menggugah memori terhadap slogan antisemitisme era Nazi dan dianggap bertentangan dengan prinsip dasar keberadaan Israel (Weinthal, 2021). Puncaknya terjadi pada awal tahun 2020. Pada Januari, Presiden Dewan Nasional Austria, Wolfgang Sobotka, menyampaikan dalam sebuah simposium Holocaust bahwa Austria menentang kampanye BDS yang ia anggap sebagai bentuk antisemitisme terang-terangan (World Israel News, 2020) . Tak lama kemudian, pada 27 Februari 2020, Parlemen Nasional Austria secara bulat mengutuk segala bentuk antisemitisme, termasuk yang berkaitan dengan Israel, dan secara eksplisit menyebut BDS sebagai pola antisemitisme yang muncul di Austria (Parlament Österreich, 2020). Martin

Engelberg, anggota parlemen dari Partai Rakyat Austria, menegaskan sikap parlemen melalui akun *Twitter*-nya dan menyatakan bahwa BDS tidak boleh didukung dalam bentuk apa pun (Jewish News Syndicate, 2020). Lukas Mandl, anggota Parlemen Eropa dari Austria, menilai keputusan tersebut sebagai langkah historis dan menegaskan dukungan penuh Austria terhadap Israel, menyebutnya sebagai mitra strategis dalam hal keamanan, demokrasi, dan supremasi hukum di kawasan Timur Tengah (Staff & Ahren, 2020). Berikut adalah penjabaran Respons Austria terhadap Gerakan BDS dalam bentuk tabel.

Tabel 2.3 Reaksi Austria Terhadap Gerakan BDS

Tahun	Aktor	Tindakan	Keterangan Tambahan
2016	Komunitas Yahudi di Wina	Menolak gerakan BDS	Lebih dari 7.000 orang Yahudi menyatakan penolakan terhadap BDS karena mengandung unsur antisemitisme.
2017	Österreichisch - Israelische Gesellschaft	Menyatakan BDS antisemitik dan	Menilai BDS terlibat dalam demonisasi Israel; BDS Austria

		ilegal secara administratif	tidak terdaftar resmi di Kementerian Dalam Negeri.
2017	ÖH (Perhimpunan Mahasiswa Nasional Austria)	Meloloskan resolusi menolak BDS	Menyebut BDS antisemitik, menyerukan pelarangan dana & fasilitas kampus, dan mengadopsi definisi antisemitisme IHRA.
April 2018	Erste Group	Menutup rekening bank milik BDS Austria	Diduga karena tekanan politik; mencerminkan tren penolakan BDS di Eropa.
27 Jun 2018	Dewan Kota Wina	Meloloskan resolusi anti - BDS	Menyebut BDS antisemitik dan melarang kegiatan BDS di ruang publik.
27 Jun 2018	Peter Florianschutz (anggota Dewan Kota Wina)	Pernyataan menolak BDS	Menyebut BDS sebagai bentuk antisemitisme global; menolak penggunaan fasilitas kota.

14 November 2019	Dewan Kota Graz	Meloloskan resolusi anti-BDS	Melarang dukungan dan fasilitas kota untuk kegiatan pro-BDS.
2019	Sibylle Hamann (Partai Hijau)	Menyerang BDS lewat pernyataan publik	Membandingkan BDS dengan slogan Nazi “Don’t buy from Jews.”
2019	Politisi Parlemen Austria (termasuk Reinhold Lopatka)	Mengusulkan resolusi anti-BDS	Menyebut BDS bertentangan dengan eksistensi Israel dan menyerukan pelarangan fasilitas publik untuk pendukungnya.
2019	KPÖ Graz	Awalnya menolak resolusi anti-BDS	Pada 2021, berbalik arah: menyebut BDS sebagai gerakan antisemitik & menegaskan hak eksistensi Israel.

Januari 2020	Wolfgang Sobotka (Presiden Dewan Nasional Austria)	Pernyataan menolak BDS di forum Holocaust	Menyebut BDS sebagai antisemitisme terang-terangan.
27 Februari 2020	Parlemen Nasional Austria	Mengadopsi resolusi anti-BDS	Mengutuk semua bentuk antisemitisme; menyebut BDS sebagai pola antisemitisme yang muncul di Austria.
27 Februari 2020	Martin Engelberg (ÖVP)	Menegaskan sikap parlemen via Twitter	Menyatakan bahwa BDS tidak boleh didukung dalam bentuk apa pun.
2020	Lukas Mandl (anggota Parlemen Eropa, ÖVP)	Mendukung resolusi Austria dan hubungan dengan Israel	Menyebut keputusan sebagai “bersejarah” dan mendorong agenda positif UE - Israel.

2.3 Trauma Sejarah dan Narasi Antisemitisme dalam Kebijakan Austria

Austria memiliki hubungan yang kompleks dengan masa lalunya, khususnya terkait perannya dalam Holocaust. Selama beberapa dekade setelah Perang Dunia II, narasi dominan menyatakan bahwa Austria adalah “korban pertama” dari aneksasi Nazi pada 1938 (*Anschluss*). Namun, dalam dua dekade terakhir, Austria mulai mengakui keterlibatan aktif sebagian warganya dalam kejahatan Holocaust. Pengakuan ini kemudian menjadi dasar moral bagi berbagai kebijakan anti - antisemitisme. Trauma sejarah tersebut dimobilisasi dalam kebijakan domestik maupun luar negeri, terutama dalam respons terhadap gerakan *Boycott, Divestment, and Sanctions* (BDS) terhadap Israel.

Pada 27 Februari 2020, Parlemen Austria secara bulat mengadopsi sebuah resolusi yang menyatakan bahwa gerakan BDS merupakan bentuk antisemitisme. Resolusi ini diusulkan oleh Partai Rakyat Austria (ÖVP) dan mendapat dukungan lintas partai, termasuk dari Partai Sosial Demokrat (SPÖ) dan Partai Kebebasan Austria (FPÖ). Dalam dokumennya, parlemen menyatakan bahwa kampanye BDS “mengingat pada fase tergelap dalam sejarah Austria dan Jerman,” serta mendorong pemerintah dan institusi publik untuk tidak memberikan ruang atau dukungan kepada organisasi yang terafiliasi dengan gerakan tersebut (Wheintal, 2020c). Meskipun tidak bersifat mengikat secara hukum, resolusi ini memiliki dampak simbolis dan politis yang signifikan, khususnya dalam mempersempit

ruang gerak organisasi pro - Palestina dan pembela hak asasi manusia di Austria (Staff & Ahren, 2020).

Narasi antisemitisme digunakan secara eksplisit dalam resolusi ini sebagai justifikasi untuk menolak gerakan BDS, sekaligus menunjukkan bagaimana memori kolektif tentang Holocaust difungsikan sebagai perangkat normatif dalam menentukan batas wacana publik yang dianggap sah. Kebijakan ini tidak terlepas dari hubungan erat Austria dengan Israel, termasuk kerja sama dalam bidang ekonomi, keamanan, serta pendidikan Holocaust. Namun demikian, pendekatan ini menuai kritik dari sejumlah organisasi masyarakat sipil dan akademisi. Mereka menilai bahwa pelabelan otomatis terhadap BDS sebagai antisemitisme berisiko membungkam kritik sah terhadap kebijakan pemerintah Israel, dan berpotensi melanggar prinsip kebebasan berekspresi sebagaimana dijamin dalam hukum internasional. Misalnya, *European Legal Support Center* (ELSC) menyatakan bahwa langkah Austria ini merupakan bagian dari tren “ penyalahgunaan narasi antisemitisme ” untuk membungkam aktivis pro - Palestina di Eropa (European Legal Support Center, 2021).

Dengan demikian, kasus Austria menunjukkan bagaimana trauma sejarah nasional dikonstruksi ulang sebagai dasar legitimasi bagi kebijakan kontemporer, khususnya dalam konteks sekuritisasi gerakan sosial transnasional. Narasi antisemitisme berperan ganda yaitu sebagai wujud tanggung jawab moral negara terhadap masa lalu, sekaligus sebagai instrumen untuk membatasi ekspresi politik yang dipandang mengancam solidaritas strategis Austria terhadap Israel.

2.4 Dinamika Hubungan Austria dan Israel

Austria secara resmi mengakui keberadaan negara Israel pada tanggal 5 Maret 1949. Walaupun hubungan informal antara kedua negara telah terjalin sejak dekade 1950 - an, hubungan diplomatik baru dibentuk secara resmi pada tingkat legasi pada tahun 1956 dan ditingkatkan ke level kedutaan besar pada tahun 1959 (Govrin, 2016). Proses ini berlangsung cukup panjang dan kompleks, disebabkan oleh sejarah kelam Austria yang terkait erat dengan Perang Dunia II dan Holocaust, yang menewaskan ratusan ribu warga Yahudi di Austria. Tidak seperti hubungan Israel dengan negara-negara lain yang sering kali dipengaruhi oleh konflik Arab - Israel, relasi antara Austria dan Israel lebih banyak dibentuk oleh pengalaman sejarah yang menyakitkan, khususnya penderitaan komunitas Yahudi di Austria.

Israel awalnya menunjukkan keraguan besar untuk menjalin hubungan formal dengan Austria, karena luka sejarah yang masih membekas di kalangan Yahudi. Negara Yahudi tersebut beberapa kali menolak pendekatan diplomatik Austria dan menetapkan sejumlah syarat sebelum menjalin hubungan formal. Salah satu syarat tersebut adalah penyelesaian perjanjian dengan komunitas Yahudi Wina, termasuk penandatanganan Konferensi Klaim Material Yahudi terhadap Austria sebagai bentuk kompensasi atas kejahatan yang dilakukan selama era Nazi (Ronald W. Zweig, 2010). Setelah berbagai prasyarat ini dipenuhi, Israel akhirnya sepakat untuk meningkatkan hubungan ke level

diplomasi pada tahun 1956. Fokus utama hubungan bilateral kala itu adalah isu klaim material dan restitusi bagi korban Holocaust.

Namun demikian, proses pemenuhan tanggung jawab material atas Holocaust berjalan sangat lambat dan penuh tantangan. Bahkan hingga lima dekade setelah pembentukan hubungan diplomasi, banyak permasalahan terkait kompensasi korban Holocaust yang belum terselesaikan (Ronald W. Zweig, 2010). Israel tetap menjaga jarak dengan Austria sampai negara tersebut menunjukkan komitmen yang serius dalam menangani konsekuensi sejarah. Salah satu faktor yang kemudian mempercepat pendekatan kedua negara adalah posisi Austria sebagai negara transit utama bagi pengungsi Yahudi dari Blok Timur, terutama dari Hongaria, yang menyebabkan Israel terpaksa membuka komunikasi lebih luas dengan Austria (Govrin, 2016).

Era baru dalam hubungan bilateral dimulai pada tahun 1992 dengan terpilihnya Thomas Klestil sebagai Presiden Austria. Kepemimpinan Klestil membuka peluang untuk memperbaiki serta memperluas kerja sama antara Austria dan Israel dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan keamanan. Kedua negara mulai saling melakukan kunjungan resmi di tingkat kementerian, termasuk Kementerian Luar Negeri, Perdagangan, Kebudayaan, dan Pertahanan (Govrin, 2016). Meskipun demikian, isu tanggung jawab atas Holocaust tetap menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan dalam hubungan ini.

Pada tahun 1993 dan 1994, Kanselir Vranitzky dan Presiden Klestil melakukan kunjungan resmi ke Israel sebuah langkah penting dalam sejarah diplomasi kedua negara. Hubungan yang semakin erat juga tercermin dalam meningkatnya minat lembaga akademik Austria terhadap studi Yahudi dan sejarah Israel. Universitas - universitas di Austria mulai menawarkan kursus terkait studi Yahudi, serta mengadakan kuliah umum tentang Israel dan proses perdamaian di Timur Tengah. Kedutaan Besar Israel di Austria pun aktif membangun kerja sama dengan institusi akademik dan budaya, termasuk Yad Vashem dan Perkumpulan Persahabatan Austria - Israel (Govrin, 2016).

Namun, dinamika hubungan kedua negara kembali mengalami ketegangan selama masa pemerintahan Kanselir Sebastian Kurz. Hal ini disebabkan oleh koalisi pemerintahan Austria yang melibatkan Partai Kebebasan (FPÖ), sebuah partai sayap kanan dengan latar belakang sejarah yang terkait dengan Nazisme dan antisemitisme. Israel dengan tegas menolak menjalin kontak dengan para menteri dari partai tersebut, meskipun pemerintah Austria menyatakan keinginan untuk menjalin hubungan normal dengan seluruh elemen pemerintah. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, bahkan menginstruksikan agar pejabat Israel tidak melakukan pertemuan dengan menteri dari FPÖ (Jewish Telegraphic Agency, 2017).

Sejak tahun 2019, sejumlah inisiatif dilakukan untuk memperbaiki kembali hubungan Austria - Israel. Salah satunya adalah penyelenggaraan diskusi publik yang diorganisasi oleh Kedutaan Besar Austria, seperti forum yang bertajuk

“From the Birthplace of Zionism to Austria - Israeli Relations” yang diselenggarakan pada 18 November 2019 bersama American University’s Center for Israel Studies. Dalam forum tersebut, Duta Besar Weiss memberikan ulasan historis mengenai hubungan Austria - Israel, sementara Prof. Brenne menekankan akar historis hubungan tersebut sejak era Theodor Herzl di Wina pada akhir abad ke-19 (Austrian Embassy Washington, 2019).

Memasuki dekade 2020 - an, hubungan kedua negara menunjukkan pemulihan yang signifikan. Austria secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap Israel dalam menghadapi gerakan BDS. Austria bahkan mengadopsi resolusi untuk mengecam antisemitisme dan aksi BDS sebagai bentuk solidaritas terhadap Israel. Anggota Parlemen Eropa asal Austria, Lukas Mandl, menyatakan bahwa kemitraan Austria - Israel menjadi model yang patut dicontoh oleh negara - negara Eropa lainnya (Lukasmandl.eu, 2021). Sebagai simbol nyata solidaritas tersebut, Kanselir Kurz mengibarkan bendera Israel di atas gedung Kanseliran di Wina pada tahun 2021 (AFP, 2021).

Austria dan Israel juga memiliki hubungan ekonomi yang terus berkembang, terutama dalam bidang pertahanan, teknologi, dan inovasi. Salah satu bentuk konkret dari kerja sama ini adalah kemitraan dengan perusahaan pertahanan Israel pada tahun 2000 yaitu Elbit Systems yang memiliki anak perusahaan di Austria bernama ESL Advanced Information Technology GmbH. Tujuan utama dari kerjasama kedua negara ini adalah menyediakan sistem komando & kontrol untuk Angkatan Bersenjata Austria dengan nilai kontrak awal yang berjumlah 10

juta USD(Globes, 2000). Pada tahun 2020, hubungan ekonomi antara Austria dan Israel menunjukkan dinamika yang cukup signifikan, terutama dalam sektor perdagangan barang. Total nilai perdagangan antara kedua negara mencapai sekitar 685,9 juta USD. Dari jumlah tersebut, Austria mengimpor barang senilai 609,6 juta USD dari Israel, sementara eksportnya ke Israel hanya sebesar 76,3 juta USD (Trading Economics, 2020). Ketimpangan ini menciptakan defisit perdagangan yang cukup besar bagi Austria. Secara umum, hubungan perdagangan ini menunjukkan tren peningkatan dalam lima tahun terakhir, dengan total nilai perdagangan naik sekitar 44% dibandingkan tahun 2016 yang hanya sekitar 476 juta USD (Worldbank, 2020). Produk utama yang diekspor Austria ke Israel mencakup mesin, kendaraan, dan instrumen khusus, sementara impor dari Israel didominasi oleh produk farmasi. Selain perdagangan barang, kedua negara juga menjalin kerja sama di bidang teknologi, penelitian khususnya di sektor life sciences dan teknologi informasi serta pariwisata, meskipun sektor terakhir ini terdampak oleh pandemi COVID-19 pada tahun 2020 (Ruqayyah Snyder, 2025). Hubungan ekonomi yang berkembang ini juga tidak lepas dari peningkatan hubungan diplomatik sejak akhir 2010-an, termasuk kunjungan bilateral dan perjanjian kerja sama strategis.

2.5 Penggunaan definisi antisemitisme versi IHRA oleh Austria

Dalam beberapa tahun terakhir, definisi antisemitisme menjadi sumber perdebatan global yang intens, terutama sejak dirumuskannya *working definition of antisemitism* oleh *International Holocaust Remembrance Alliance* (IHRA) pada

tahun 2016. Definisi ini dengan cepat diadopsi secara luas, termasuk oleh Austria, yang kemudian menggunakannya sebagai kerangka normatif dalam kebijakan domestik dan internasional. Namun, adopsi ini tidak lepas dari kontroversi, khususnya terkait hubungannya dengan kebebasan berekspresi dan kriminalisasi gerakan solidaritas Palestina seperti BDS.

IHRA adalah organisasi antarpemerintah yang dibentuk pada tahun 1998 dengan fokus pada pendidikan, penelitian, dan peringatan Holocaust. Pada tahun 2016, organisasi ini merumuskan definisi kerja antisemitisme sebagai “ Suatu persepsi terhadap orang Yahudi yang dapat diekspresikan sebagai kebencian terhadap orang Yahudi.” Selain definisi tersebut, IHRA juga mencantumkan sebelas contoh perilaku yang dianggap antisemitisme, termasuk yang berkaitan dengan Israel, seperti menyamakan kebijakan Israel dengan Nazi atau menolak hak eksistensi Israel sebagai negara Yahudi (International Holocaust Remembrance Alliance, 2016). Alasan mengapa tindakan seperti menyamakan Israel dengan Nazi, menolak hak eksistensi Israel sebagai negara Yahudi, atau menerapkan standar ganda terhadap Israel dianggap antisemitisme oleh IHRA tidak dapat dipisahkan dari sejarah panjang antisemitisme, trauma Holocaust, serta pergeseran bentuk antisemitisme dari tradisional ke modern.

Setelah Perang Dunia II dan Holocaust yang menewaskan enam juta orang Yahudi, narasi antisemitisme klasik yaitu berbasis agama atau ras menjadi tabu di banyak masyarakat Barat. Namun, menurut IHRA, bentuk antisemitisme tidak hilang, melainkan bertransformasi ke dalam bentuk baru, yakni dengan

menjadikan negara Israel sebagai pengganti kolektif dari orang Yahudi. Dalam kerangka ini, kebencian atau prasangka terhadap orang Yahudi diekspresikan melalui penolakan terhadap legitimasi negara Israel, penyangkalan hak bangsa Yahudi untuk menentukan nasib sendiri, atau penggambaran Israel secara ekstrem dan jahat yang tidak proporsional jika dibandingkan dengan kritik terhadap negara lain .

Transformasi ini diperkuat oleh realitas geopolitik, terutama konflik Israel - Palestina, di mana kritik terhadap kebijakan Israel sering kali bercampur dengan narasi delegitimasi atau demonisasi yang membawa muatan antisemitisme. Misalnya, menyamakan Israel dengan Nazi tidak hanya mengaburkan perbedaan historis yang mendasar, tetapi juga mengeksploitasi trauma Holocaust untuk menyerang simbol kolektif orang Yahudi (Hirsh, 2017). Oleh karena itu, IHRA menilai bahwa bentuk antisemitisme modern ini justru lebih sulit dikenali karena sering dibungkus dalam bahasa hak asasi manusia atau kritik politik, padahal dalam substansinya mengandung pola kebencian historis yang sama (Marcus, 2015).

Austria telah menjadi anggota IHRA sejak tahun 2001. Pada Maret 2008 hingga Maret 2009, Austria memegang presidensi organisasi ini dan menunjukkan komitmen tinggi dalam memerangi antisemitisme. Sebagai presidensi dari IHRA, Austria berperan aktif mendorong adopsi definisi IHRA oleh negara - negara anggota lainnya. Pada 25 April 2017, Austria atas inisiatif Menteri Luar Negeri Sebastian Kurz secara resmi mengadopsi definisi IHRA sebagai bagian dari

kebijakan nasionalnya terkait memori Holocaust, pendidikan, dan kebijakan luar negeri.

Setelah adopsi resmi pada 2017, definisi IHRA mulai diterapkan secara luas dalam kebijakan domestik Austria, termasuk oleh lembaga-lembaga pendidikan, kebudayaan, dan diplomasi. Di tingkat lokal, Pemerintah Kota Wina (*Gemeinderat Wien*) pada Mei 2018 mengeluarkan resolusi yang menyatakan bahwa gerakan BDS bersifat antisemitisme. Resolusi tersebut secara eksplisit merujuk pada definisi IHRA dan menyerukan agar tidak ada ruang atau fasilitas publik yang digunakan untuk mendukung aktivitas BDS. Ini merupakan contoh konkret bagaimana definisi IHRA digunakan untuk membingkai gerakan solidaritas Palestina sebagai ancaman terhadap nilai-nilai demokrasi dan keberagaman.

Penggunaan definisi IHRA di Austria menuai kritik dari berbagai organisasi masyarakat sipil dan akademisi. *European Legal Support Center* (ELSC) dan *Jewish Voice for Peace* (JVP) menilai bahwa definisi ini terlalu luas dan kabur, karena menyamakan kritik terhadap Israel dengan kebencian terhadap Yahudi. Menurut mereka, hal ini dapat membuka peluang kriminalisasi terhadap gerakan solidaritas Palestina, termasuk BDS Austria (JVP Action, 2023). Aktivis pro - Palestina di Austria juga menghadapi bentuk tekanan hukum, seperti gugatan hukum strategis (SLAPP), dan pembatasan akses terhadap ruang publik. Sebagai respons terhadap dominasi IHRA, pada tahun 2021 sejumlah akademisi dan intelektual internasional merumuskan *Jerusalem Declaration on Antisemitism*

(JDA). Dokumen ini menekankan bahwa mendukung hak - hak rakyat Palestina, mengkritik Zionisme, atau mendukung BDS bukanlah antisemitisme, selama tidak disertai kebencian terhadap Yahudi sebagai kelompok etno - religius (Ayyash, 2021). Inisiatif ini juga didukung oleh kelompok kiri progresif di Eropa, seperti *Rosa Luxemburg Stiftung* dan *Center for Research on Antisemitism* (ZfA) di Berlin, yang menilai IHRA sebagai alat represi politik terhadap oposisi terhadap Israel.